

Ringkasan Proyek



International
Labour
Organization

PROMOTE: Pekerjaan Layak bagi Pekerja Rumah Tangga guna Menghapus Pekerja Rumah Tangga Anak

Tujuan	Mengurangi jumlah pekerja rumah tangga anak secara signifikan dengan meningkatkan kapasitas kelembagaan organisasi pekerja rumah tangga untuk mempromosikan pekerjaan layak bagi pekerja rumah tangga secara efektif.
Mitra Utama	Nasional ■ Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (JALA PRT) ■ Komite Aksi Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dan Buruh Migran (KAPPRT – BM) ■ Jaringan Penanggulangan Pekerja Anak (JARAK) Regional ■ International Domestic Workers Network (IDWN)
Jangka Waktu	3,5 tahun (2013 – 2016)
Cakupan Geografis	Nasional, Regional
Referensi Program Nasional:	Kemajuan Efektif Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Indonesia tentang Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak. Program Pekerjaan Layak Nasional untuk Indonesia 2012 - 2015
Donor	 Departemen Perburuhan Amerika Serikat (USDOL)
Anggaran	USD 4,999,970
Kontak	Arum Ratnawati Kepala Penasihat Teknis arum@ilo.org

Latar Belakang Proyek

Pada Juni 2011, ILO mengadopsi Konvensi No. 189 tentang Pekerjaan Layak bagi Pekerja Rumah Tangga (PRT), yang akan memperluas, bagi negara-negara yang meratifikasinya, jangkauan perlindungan bagi jutaan pekerja, terutama perempuan dan anak-anak, yang hak-hak mendasarnya belum terjamin. Konvensi ini merupakan standar global pertama bagi 52,6 juta PRT di seluruh dunia. Melalui pengadopsian ini, Konferensi Perburuhan Internasional menegaskan: PRT, juga pekerja lainnya, berhak atas kondisi kerja dan kehidupan yang layak. Konvensi ini dengan jelas menegaskan bahwa anak-anak di atas usia minimum untuk bekerja harus diberi perlindungan khusus saat melakukan pekerjaan domestik. Proyek PROMOTE mempromosikan perwujudan Pekerjaan Layak untuk PRT sebagai upaya mengurangi pekerja rumah tangga anak (PRTA).

"Saya yakin Konvensi ini dapat memberikan panduan kepada pemerintah di negara asal maupun tujuan PRT agar dapat melindungi PRT migran. [...] PRT yang bekerja di negara mereka sendiri pun harus diberi perlindungan yang sama. Oleh karena itu, Konvensi ini akan membantu kita dalam merumuskan peraturan dan perundangan nasional yang efektif dalam mencapai tujuan tersebut."

Presiden Republik Indonesia,
pada Sidang ke-100 Konferensi Perburuhan Internasional, 14 Juni 2011

Sebagai negara berpendapatan menengah, dengan tingkat pertumbuhan tinggi dan kelas menengah yang semakin berkembang, permintaan akan PRT di Indonesia semakin meningkat. ILO memperkirakan sedikitnya ada 2,6 juta PRT (90 persen perempuan) di Indonesia, di mana 700.000 di antaranya merupakan anak-anak berusia di bawah 18 tahun (26 persen). Hak-hak mendasar PRT sebagai pekerja di Indonesia kurang dilindungi oleh Undang-Undang (UU) Ketenagakerjaan Tahun 2003 karena pekerjaan mereka yang sebagian besar di sektor informal tidak tercakup di dalam UU tersebut. Karenanya, mereka rentan terhadap berbagai tindak kekerasan dan eksploitasi, termasuk jam kerja yang panjang, upah tidak dibayar, pengurangan secara paksa, kekerasan fisik dan/atau seksual, kerja paksa dan perdagangan. Sikap yang sudah tertanam dan nilai-nilai budaya yang ada menjadi hambatan dalam memastikan pekerjaan layak untuk PRT.

PRT umumnya tidak dianggap sebagai pekerja, tapi hanya sekedar "pembantu," akibatnya majikan mereka tidak mengakui kewajiban-kewajibannya sebagai majikan yang umumnya muncul dari hubungan kerja. Kebutuhan dasar dijanjikan dalam bentuk upah minimum. Majikan biasanya juga menganggap pekerjaan domestik, terutama PRT yang menginap, sebagai kegiatan 24 jam sehari, sehingga menghambat penerapan peraturan tentang jam kerja dan hari libur.



Untuk mengatasi persoalan ini, organisasi-organisasi PRT telah melakukan advokasi reformasi hukum dan perlindungan yang lebih baik. Mereka telah membentuk aliansi untuk mengusung kerangka permasalahan yang sama. Namun, kapasitas organisasi-organisasi ini untuk secara efektif mengadvokasi perlindungan hukum dan memberdayakan PRT agar dapat memperbaiki kondisi kerja mereka, melaporkan adanya tindak kekerasan dan mengarahkan PRTA ke layanan-layanan yang tepat, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak PRT perlu ditingkatkan. Penting juga adalah pengembangan pengalaman signifikan yang didukung, dan peluang, serta komitmen Pemerintah Indonesia untuk meratifikasi Konvensi ILO No. 189 dan meningkatnya kesadaran masyarakat tentang persoalan ini.

Proyek PROMOTE bertujuan mengurangi PRTA secara signifikan dengan meningkatkan kapasitas kelembagaan Organisasi-organisasi PRT agar dapat mempromosikan Pekerjaan Layak bagi PRT secara efektif. Proyek ini berupaya meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan keahlian dalam mengurangi PRTA dan mempromosikan Pekerjaan Layak bagi PRT dari Organisasi PRT, dengan fokus utama pada Indonesia, yaitu negara keempat terpadat penduduknya di dunia dan tempat tinggal bagi jutaan PRT maupun PRTA. Efektivitas di Indonesia tentunya akan menjangkau jumlah yang lebih besar dan punya berlipat terhadap pengembangan kebijakan di kawasan ini, terutama di ASEAN.

Strategi Proyek

Strategi Nasional dan Provinsi: PROMOTE bekerja sama dengan tiga koalisi/jaringan strategis, yaitu JALA PRT, KAPPRT-BM dan JARAK, untuk memengaruhi wacana publik dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam menghapus PRTA dan mempromosikan Pekerjaan Layak bagi PRT.

Proyek ini akan membangun kapasitas Organisasi PRT dalam mengatasi masalah PRTA dan mempromosikan Pekerjaan Layak bagi PRT sesuai Konvensi ILO No. 189, 138, dan 182.

Bidang-bidang dampak utama termasuk:

- 1) peningkatan perlindungan dan penegakan hukum untuk mempromosikan Pekerjaan Layak bagi PRT serta mengurangi PRTA, 2) peningkatan kondisi kerja dan hidup PRT, 3) mekanisme pelaporan publik yang efektif untuk melaporkan adanya eksploitasi PRT, 4) penciptaan mekanisme yang dapat diandalkan dalam melaporkan kasus-kasus eksploitasi kepada pihak berwenang dan tersedianya penyedia layanan sosial, dan 5) PRT, majikan mereka dan masyarakat luas memahami perlunya Pekerjaan Layak bagi PRT.

Strategi regional: PROMOTE akan berinvestasi di bidang pengembangan kapasitas dua organisasi regional yang berpengaruh. IDWN akan mempromosikan peningkatan

kapasitas dan berbagi pengetahuan; sementara International Trade Union Confederation Asia Pacific Regional Organization (ITUC-APRO) akan memobilisasi serikat pekerja untuk meningkatkan perlindungan dan pengakuan terhadap Pekerjaan Layak bagi PRT dan pencegahan PRTA.

Melalui kerjasama dengan IDWN, mitra-mitra Organisasi PRT di Indonesia akan diundang untuk mengikuti kerangka kerja kelembagaan di mana mereka dapat belajar dari pengalaman dan praktik terbaik di kawasan Asia dan sekitarnya¹, dan diberdayakan untuk menerapkan pengetahuan mereka di Indonesia guna melakukan kegiatan domestik. Melalui saluran yang sama, pada tahap berikutnya dari proyek ini, struktur regional dan global ini akan memperoleh manfaat dari pengetahuan dan praktik terbaik yang dihasilkan di Indonesia.

Komponen Proyek

- **Peningkatan Kapasitas Organisasi Pekerja Rumah Tangga**

Pilar utama PROMOTE adalah meningkatkan kapasitas kemitraan Organisasi PRT untuk mengambil tindakan di berbagai bidang dan mengurangi PRTA dengan mempromosikan Pekerjaan Layak bagi PRT.

- **Kemitraan Inovatif**

PROMOTE akan mendorong kemitraan inovatif dengan berbagai aktor dan lembaga seperti serikat pekerja (termasuk serikat guru), agen penyalur tenaga kerja, wartawan, perusahaan media dan telekomunikasi, kaum muda, kelompok masyarakat dan sebagainya, di mana masing-masing akan menawarkan langkah-langkah tersendiri untuk mengurangi PRTA dan mempromosikan Pekerjaan Layak bagi PRT di Indonesia.

- **Meningkatkan Kapasitas Regional: Manual Pelatihan dan Laporan Praktik yang Menjanjikan**

Berbagi pengetahuan dan fertilisasi lintas Selatan-Selatan antara Organisasi PRT dengan negara-negara lain di kawasan ini untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam mengatasi masalah PRTA dan mempromosikan Pekerjaan Layak bagi PRT menjadi strategi utama dari proyek ini dan IDWN akan menjadi mitra penting dalam hal ini.

- **Meningkatkan Aliansi Regional: Lokakarya dan Berbagi Pengetahuan**

Dua lokakarya regional skala besar akan diadakan proyek ini. Biro Kegiatan Pekerja ILO akan melaksanakan lokakarya-lokakarya ini, yang akan menyediakan forum bagi serikat pekerja, Organisasi PRT dan pemangku kepentingan lainnya untuk membahas dan berbagi sistem pendekatan yang inovatif guna memenuhi kebutuhan PRTA dengan mempromosikan Pekerjaan Layak bagi PRT, serta membahas strategi-strategi untuk mendukung pelaksanaan Konvensi ILO No. 189.

- **Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi**

PROMOTE akan mengembangkan sebuah model dan percontohan awal dari sistem informasi dan teknologi komunikasi yang memungkinkan PRT berhubungan dengan layanan pendidikan, sosial dan hukum yang mungkin mereka butuhkan, dan mendokumentasikan serta melaporkan kasus-kasus eksploitasi. Sistem ini juga dapat digunakan untuk mengumpulkan informasi, melakukan kajian cepat dan pengumpulan angket (polling).

- **Mendukung Penelitian dan Evaluasi tentang Pekerjaan PRTA**

PROMOTE akan mendukung sejumlah penelitian penelitian di bidang-bidang berikut:

- a) Peningkatan pengetahuan sebagai bagian dari strategi substantif yang akan mencakup perkiraan jumlah PRT/PRTA dan penelitian aksi yang dikaitkan langsung dengan upaya membangun kapasitas Organisasi PRT dengan memasukkan elemen-elemen pekerjaan mereka seperti penelitian tentang kondisi kerja PRT dan PRTA; penelitian tentang upah berbagai kelompok PRT; penelitian regional tentang mekanisme ketenagakerjaan atau referensi kerja (India, Republik Korea) dan sebagainya;
- b) Dokumentasi dan penelitian berbasis hasil;
- c) Dokumentasi Praktik yang menjanjikan; dan
- d) Penelitian berbasis hasil untuk menyikapi perubahan kebijakan di tingkat nasional maupun provinsi.

- **Mempromosikan Transparansi dan Akuntabilitas**

Transparansi dan akuntabilitas merupakan prinsip utama dari strategi PROMOTE dan akan dipromosikan oleh semua komponennya untuk memastikan adanya kegiatan berbagi pengetahuan dan informasi serta membantu keberlanjutan kegiatan proyek ini untuk jangka panjang.



1 Terutama difokuskan pada enam negara yang menjadi anggota IDWN selain Indonesia, yaitu Bangladesh, India, Nepal, Filipina, Republik Korea dan Thailand.